

SKRIPSI

**KONSTITUSIONALITAS DESAIN PEMERINTAHAN OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program SI Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

DARA YUWINDA

2110111105

Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V)



Pembimbing

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.

Ilhamdi Putra, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No Reg: 02/PK-V/III/2025

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 02/PK-V/III/2025

KONSTITUSIONALITAS DESAIN PEMERINTAHAN OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA

Constitutionality of the Government Design of the Nusantara Capital Authority

Disusun Oleh:
Author:

Dara Yuwinda
NIM: 2110111105

Program Kekhususan (PK): Hukum Tata Negara (PK V)
Concentration Program (CP): Constitutional Law (CP V)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada
tanggal 11 Juni 2025 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri
Dari:

*This Minor Thesis Was Defended in the Comprehensive Examination Session on
April 11, 2025 and Approved by a Team of Examiners Consisting of:*

Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP: 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I

Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL
NIP: 198208092005012002

Pembimbing I
Supervisor I

Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
NIP: 198111302010121005

Pembimbing II
Supervisor II

Ilhamdi Putra, S.H., M.H.
NIP: 199409162022031008

Penguji I
Examiner I

Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.
NIP: 197205162000031002

Penguji II
Examiner II

Beni Kharisma Arrasli, SHI., LL.M.
NIP: 198303312015041001

	No. Alumni Universitas		Dara Yuwinda		No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir :	Bukittinggi/ 21 Maret 2003		f. Tanggal Lulus :	11 Juni 2025
	b. Nama Orangtua :	Darmawin, Darnalis		g. Predikat Lulus :	Dengan Pujian
	c. Fakultas :	Hukum		h. Lama Studi :	3 Tahun 10 Bulan
	d. PK :	Hukum Tata Negara		i. IPK :	3,72
	e. No. BP :	2110111105		j. Alamat :	Jl.NJ Mangkuto Ameh Geregeh

KONSTITUSIONALITAS DESAIN PEMERINTAHAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Dara Yuwinda 2110111105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 halaman, Tahun 2025,

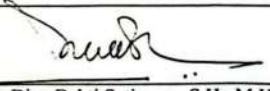
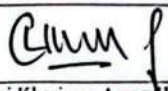
ABSTRAK

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk untuk menyelenggarakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, sekaligus menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus di wilayah IKN. Namun, pembentukan Otorita IKN menimbulkan persoalan hukum terkait bentuk dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks sistem pemerintahan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah: pertama, bagaimanakah konstitusionalitas desain wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia? dan kedua, Bagaimanakah konstitusionalitas desain jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persoalan konstitusional dalam desain Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Beberapa di antaranya adalah penggunaan nomenklatur "otorita" yang tidak dikenal dalam sistem pemerintahan daerah, ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta mekanisme penunjukan Kepala Otorita secara langsung oleh Presiden tanpa proses pemilihan. Selain itu, jabatan Kepala Otorita lebih merepresentasikan kepala wilayah administratif daripada kepala pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam sistem otonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar desain Pemerintahan Daerah Khusus IKN diarahkan menjadi wilayah administrasi. Apabila tetap ingin menerapkan bentuk pemerintahan daerah khusus, maka perlu dilakukan pembedaan yang tegas antara masa persiapan pembangunan IKN dan masa pelaksanaan pemerintahan daerah khusus di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Kepala Otorita, Ibu Kota Nusantara, Pemerintahan Daerah

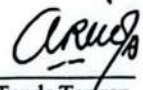
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.	Beni Kharisma Arras, S.H., LL.M.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara: Arfiani, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Dara Yuwinda	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Bukittinggi /21 st Maret 2003 b. Parents' Name : Darmwin, Darmalis c. Faculty : Law d. Concentration : Constitutional Law e. Student ID : 2110111105	f. Graduation Date : 11 June 2025 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 3 years 10 month i. GPA : 3,72 j. Address : Jl.NJ Mangkuto Ameh Garegeh	

Constitutionality of the Government Design of the Nusantara Capital Authority

Dara Yuwinda 2110111105, Faculty of Law, Andalas University, 67 pages, 2025

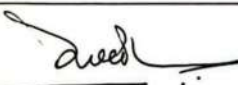
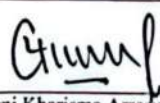
ABSTRACT

The Nusantara Capital Authority (IKN) is a ministry-level institution established to oversee the preparation, development, and relocation of the State Capital, as well as to organize special regional governance in the IKN area. However, the establishment of the IKN Authority raises legal issues concerning its form and position within the Indonesian constitutional system, particularly in the context of the local government system regulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on this, this research focuses on two main formulations: first, how constitutional is the design of the Nusantara Capital Authority area within Indonesia's local government system? and second, how constitutional is the design of the position of the Head of the Nusantara Capital Authority? This study employs normative legal research methods, utilizing a statute approach, a historical approach, and a comparative approach. The findings indicate constitutional problems in the design of the IKN Special Regional Government. These include the use of the nomenclature "authority," which is not recognized in the local government system, the absence of a Regional People's Representative Council (DPRD), and the mechanism for appointing the Head of the Authority directly by the President without an election process. Furthermore, the position of the Head of Authority represents an administrative regional head rather than a local government head, as stipulated in the regional autonomy system. Therefore, this study recommends that the design of the IKN Special Regional Government be aligned with an administrative area. If a special form of regional government is still desired, a clear distinction must be made between the preparation period for IKN development and the implementation period of special regional government in the region.

Keywords: Head of Authority, Nusantara Capital, Regional Government

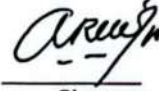
This minor thesis has defended in front of the examiner team at , 2025.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H	Beni Kharisma Arrasuli, SHI.,LLM.

Acquainted,

Head of the Department of Constitutional Law: Arfiani, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: